

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan suatu daerah merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara didunia dewasa ini, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara yang berkembang dan anggota asean, Indonesia mempunyai tingkat pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan anggota ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kelangkaan modal dan untuk memperoleh modal, pemerintah berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan mengembangkan usaha ke Indonesia. Kabupaten Kulon Progo Memiliki Pesona Budaya daerah dan keindahan alamnya yang khas, hutan yang menghijau disebelah utara yang terkenal dengan pegunungan Menoreh. Dan letak perbatasan langsung dengan Samudra Hindia disebelah selatan memiliki potensi alam.

Namun kondisi investasi asing di Kabupaten Kulon Progo yang menargetkan pada tahun 2010 meningkat 20-30 persen akan tetapi belum tercapai. Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami kemajuan paling lambat. Kabupaten Kulon Progo termasuk paling sedikit investasi asingnya dan sampai saat ini masih belum banyak diketahui masyarakat luas/investor baik dalam negeri (PMDN) maupun investor asing (PMA).

Perkembangan investasi yang tidak ada peningkatan ini berpengaruh dengan pertumbuhan ekonmi dan pendapatan daerah Kabupeaten Kulon Progo yang menurun dalam masalah pembiayaan daerah dan terancam tidak ada

pembangunan apabila tidak menemukan solusi pendanaan¹. Bagaimana upaya Kabupaten Kulon Progo untuk menarik minat para investor agar mau menanamkan modalnya di Kulon Progo.

A. TUJUAN PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis bertujuan untuk menjawab dari sebuah masalah dengan teori yang relevan serta membuktikan sebuah hipotesa dengan fakta yang ada dan data yang ada. Dimana obyek penulisan ini Kabupaten Kulon Progo sebagai penelitian penulis. Penulis juga mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi internasional Kabupaten kulon progo dalam meningkatkan investasi asing. Menggambarkan upaya para investor dalam menanamkan modalnya dan hambatan-hambatan dalam meningkatkan investasi asing.

Selain itu tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan penulisan penulisan skripsi ini ditujukan pula sebagai perwujudan teori-teori yang penulis terima selama dibangku kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah yang pernah saya dapatkan yaitu ekonomi Politik Internasional, politik luar negeri, perdagangan internasional, hukum internasional, dan hubungan internasional juga untuk menambah bahan bacaan bagi mereka berminat mengetahui bagaimana strategi internasional Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan investasi asing yang bisa meningkatkan

¹ Harian jogja terbitan tanggal 6 agustus 2010. Kulon Progo terancam tanpa pembagunan.

perekonomian dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat setempat juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai harapan. Karena pada hakekatnya manusia hanya mampu berusaha dan berencana untuk mencapai tujuannya, sedangkan Allah SWT sendiri yang menentukan ya atau tidak tercapainya usaha pencapaian tujuan itu.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan suatu bangsa khususnya pembangunan ekonomi sebagai titik beratnya harus ada acuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan sehingga pemerintah selalu berusaha menarik pengusaha asing guna menanamkan modalnya agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan perubahan-perubahan system diberbagai bidang dan meningkatkan sumberdaya manusia demi tercapainya tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk menciptakan stabilitas social, politik, ekonomi, dan salah satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kelangkaan modal. Dan untuk memperoleh modal. Pemerintah berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan mengembangkan usahanya ke Indonesia. Modal merupakan factor utama dalam pelaksanaan pembangunan. Masalah kelangkaan modal banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang juga

menjadi karekteristik atau ciri umum dari setiap Negara berkembang antara lain²:

1. Standar hidup yang relative rendah, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kurang memadainya pelayanan kesehatan dan pendidikan,
2. Tingkat produktifitas yang rendah,
3. Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi.
4. Angka pengangguran terbuka maupun terselubung yang sangat tinggi dan akan terus bertambah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas,
5. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada sector produksi pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan mentah).
6. Pasar tidak sempurna dan informasi yang tersedia pun sangat terbatas,
7. Dominasi ketergantungan, kerapuhan yang parah pada hamper semua aspek hubungan internsional.

Beberapa factor tersebut tidak bisa dihindari, Indonesia pun mengalami hal tersebut.

Untuk mengatasi keterbatasan kekurangan modal pembangunan, yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan karateristik diatas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sumber dana dari luar negeri berperan mengatasi kekurangan pendanaan pembagunan (sumber modal). Adapun bentuk-bentuk dari penanaman modal asing antara lain investasi asing secara langsung (foreign direct investment), investasi tidak langsung berbentuk portopolio, serta kredit impor³. Dari bentuk-bentuk ini yang menonjol adalah investasi secara langsung (foreign direct investment), baik yang bersifat penuh maupun patungan (joint venture) dengan kekuatan ekonomi domestic. Investasi asing ini

² Michael. P. Todara, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta, Erlangga, 1998. Hal. 45-46

³ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dan Hubungan Studi Mengenai Otonomi, Demokratosasi, Globalisasi dan Investasi*, Yogyakarta 2001, hal 115

merupakan sumber-sumber baru yang dibutuhkan oleh Negara berkembang dalam membangun masa depannya⁴.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2008 mencapai 4,12 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2006 yang mencapai 4,05 persen. Sektor yang maju adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 8,26 persen. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan yang tinggi di salah satu sektornya yakni sub sektor bank yang mengalami kemajuan sebesar 29 persen. Sektor lain yang cukup pesat pertumbuhan di tahun 2008 adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan laju pertumbuhan 6,26 persen. Pendapatan asli Daerah tahun 2007 Rp. 38,637 miliar, pendapatan asli Daerah tahun 2008 Rp42,289 miliar, pendapatan asli daerah tahun 2009 Rp 41,937 miliar⁵.

Kondisi Kabupaten Kulon Progo yang menurun dalam masalah pendanaan pembangunan. Kabupaten kulon Progo tidak bisa mengandalkan dana dari pusat dan dana dari BUMD dalam pembangunan . Maka dari itu Kulon Progo harus mempunyai terobobosan dalam pendanaan, salah satunya mengoptimalkan potensi Sumber daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, menargetkan investasi di daerah ini pada 2010 naik 20 hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah investasi Penanam Modal Asing (PMA) tahun 2009 Rp. 12.110.000.000,- dan pada tahun 2010 Rp. 19.056.400.000,-⁶

⁴ Steven J.Rusen dan Walter S.Jones. The Logic of Internasional Relation inc, Massachussetts,1980, hal.150

⁵ Badan Pusat statistic Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2009, Hal 467

⁶ Jumlah unit usaha, nilai investasi dan tenaga kerja di Kab. Kulon Progo, Kantor penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo.

Tapi, sampai kini kawasan mega proyek pengembangan industri khusus di sekitar pelabuhan Adi Karta masih sepi investor. Tiga investor dari Korea Selatan, Thailand, dan Surabaya yang sudah melakukan survei juga belum pasti menginvestasikan modalnya di Kulon Progo. Belum ada investor yang benar-benar akan menginvestasikan modalnya di Kulon Progo. Kebanyakan investor sebatas melihat lokasi dan potensinya⁷. Pemerintah daerah belum memiliki kebebasan dalam bertindak seluas-luasnya untuk menjadikan daerah sebagai daerah otonom . Semua kegiatan lebih banyak diserahkan langsung ke pusat, dengan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah atas kewenangan penanaman modal diharapkan lebih meningkatkan pelayanan publik dan sekaligus memperkuat kemampuan daerah dan nasional untuk menghadapi era globalisasi juga memberikan kemudahan dalam dunia usaha dan penanaman modal.

Kebijakan otonomi daerah yang berlaku tanggal 1 Januari 2001 diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Kebijakan otonomi daerah tersebut diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Guna mendukung kedua undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pemerintah tambahan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah. Dalam konteks ini terdapat tiga buah peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Sejauh ini kedua undang-undang tersebut secara pokok memberikan sebuah kebebasan bertindak seluas-luasnya kepada daerah namun tetap dalam rangka otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk

⁷ Media Indonesia.com, diakses 10 Agustus 2010 Tiga investor di Kulonprogo belum jelas.

melakukan pengaturan dan pemerintahan atas wilayahnya secara mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerahnya masing-masing. Keberadaan kedua undang-undang tersebut dapat dipandang sebagai dampak positif dari proses reformasi yang bergulir sejak terjadinya krisis ekonomi yang menandai adanya perubahan paradigma yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 memiliki tujuan yaitu untuk meletakkan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberian keleluasan kebebasan bertindak kepada daerah untuk menjadi sebuah daerah yang otonom dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Pelaksanaan Otonomi daerah secara luas didasarkan pada prinsip demokrasi, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan serta pertimbangan atas potensi dan diverifikasi daerah. Sementara tujuan utama undang-undang no. 25 tahun 1999 adalah secara efektif meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, untuk menciptakan sebuah sistem keuangan daerah yang adil dan realisasi sistem pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah⁸.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten akan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan identifikasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah mereka. Dengan demikian pemerintah kota dan kabupaten harus siap menyiapkan program pembangunannya secara konseptual dan operasional. Kedudukan pemerintah kota

⁸ Departemen Luar negeri Republik Indonesia , Panduan umum tata cara hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah hal 9 Tahun 2003

dan kabupaten sebagai basis pembangunan negara berdaulat, hal demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah akan banyak tergantung pada seberapa jauh partisipasi pemerintah kota dan pemerintah daerah dalam hal ini kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing. Otonomi daerah diharapkan lebih menopang negara keistimewaan agar dapat berperan dalam era globalisasi dan memberi kemudahan dalam dunia usaha dan penanaman modal.

Pertumbuhan investasi yang tidak ada perkembangan tiga tahun terakhir ini. Hanya ada satu investasi asing yang masuk setelah otonomi daerah pada tahun 2006. Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa pemerintah daerah sering kali merusak tatanan yang sudah ada. Apa yang sudah disepakati sebelumnya baik melalui kontrak dalam maupun luar negeri sering kali diancam untuk ditinjau kembali yang dengan alasan otonomi daerah. kalangan pengusaha asing dan domestik sering kali merasa terganggu dengan sikap politisi dan birokrasi lokal yang mencoba mengutak-atik apa yang sudah disepakati sebelumnya. Padahal dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memperkuat kemampuan daerah dan nasional untuk menghadapi era globalisasi.

Pengembangan investasi yang belum berbasis pada kemampuan penguasaan teknologi dan masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerjanya mengakibatkan implikasi yang tidak ringan bagi pertumbuhan iklim investasi di Kabupaten Kulon Progo kurang meningkat. Rencana strategi (RENSTRA) kegiatan pembangunan pada BKPM Kabupaten Kulon Progo ditingkatkan pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan Prioritas Pembangunan yang memperhatikan Sumber daya alam, Sumber daya manusia

yang berwawasan lingkungan dengan penjabaran kebijakan program pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka rencana implementasi strategi secara efektif dan efisien dilaksanakan secara berkesinambungan untuk pada setiap tahun anggaran.

C. POKOK PERMASALAHAN

Sesuai pemberlakuan undang-undang tentang otonomi daerah sekarang ini diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah sehingga bisa tercapai kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat Kulon Progo dikarenakan daerah yang mereka miliki, serta mempunyai kewenangan yang mencukupi untuk menggali sumber daya keuangan sendiri dengan adanya keputusan atau kebijakan dari pemerintah daerah. Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah: ***"Bagaimana Strategi Internasional Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan investasi asing?"***

D. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penulis menggunakan Teori Hubungan Internasional, dan konsep penanaman modal, untuk melihat Strategi Internasional Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan investasi Asing.

1. HUBUNGAN TRANSNASIONAL

Richard Falk mendefinisikan, "Hubungan Transnasional adalah perpindahan barang, informasi dan gagasan melintas batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau pengendali secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah⁹. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep hubungan transnasional ini akan mengurangi makna kedaulatan dan merupakan bentuk pola kerjasama internasional yang didalamnya peranan aktor negara tidak lagi dominan dan digeser oleh peranan aktor non negara dan tidak memperhatikan batas-batas wilayah geografis yang memisahkan bangsa-bangsa.

Menurut Mochtar Masoed dalam bukunya aktor non negara dalam hubungan Internasional ini bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis, atau separatis didalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional bahkan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah¹⁰. Dalam pelaksanaan hubungan transnasional ini sering kali tanpa sepengetahuan pihak pimpinan negara yang terlibat, bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara bertindak sendiri, berinteraksi langsung dengan bagian-bagian serupa dari birokrasi pemerintah negara lain. Hal itu terjadi karena pandangan kepada isu-isu sentral dalam interaksi internasional sudah berubah.

Pola hubungan transnasional ini melibatkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai jenis aktor non negara, terutama dari organisasi internasional

⁹ Richard Falk, *A Study Of Future World*, dalam bukunya Mochtar Mas' oed, *Ibid* Hal 231

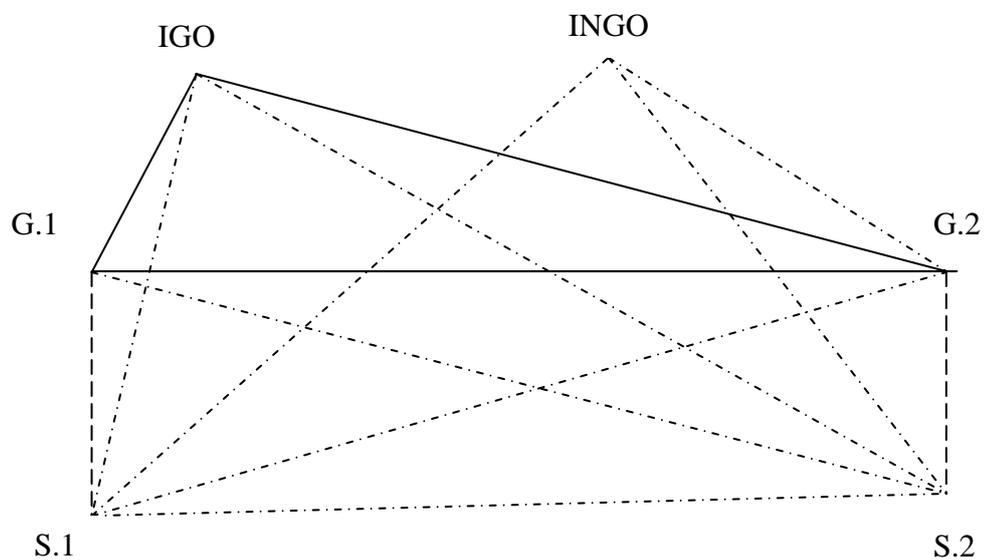
¹⁰ Mochtar Mas' oed, *ibid.* hal 231

maupun perusahaan transnasional, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul aktor baru.

Kerjasama Kabupaten Kulon Progo merupakan kerjasama internasional yang dilakukan oleh aktor non negara yaitu aktor yang merupakan bagian-bagian dari birokrasi Pemerintah pusat bisa berupa pemerintah kota atau negara bagian, masyarakat pun juga dapat berinteraksi dengan masyarakat negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan secara langsung dengan masyarakat negara lain tanpa memerlukan pemerintah pusat.

Bagan pola Interaksi hubungan Transnasional dan politik antar negara dapat digambarkan dalam bagan gambar berikut ini.

Interaksi Transnasional dan Politik Antarnegara¹¹



¹¹ Sumber : Adaptasi dari R.O Keohane dan JS Nye, *Transnational Relation and world Politic*, (dalam Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : LP3ES, 1990). Ha. 232.

Keterangan :

—————	= politik antar negara klasik
-----	= politik dalam negeri
.....	= interaksi sosial
G	= pemerintah
S	= masyarakat
IGO	= organisasi antar pemerintah
INGO	= organisasi antar non pemerintah

Dapat kita lihat bahwa hubungan internasional tidak hanya terjadi dalam lingkup negara saja (garis lurus) namun juga dari organisasi non pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Bahkan masyarakat pun dapat juga berinteraksi dengan masyarakat negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat negara lain tanpa melalui perantara pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan hubungan tersebut dapatlah diketahui bahwa pola hubungan internasional memungkinkan banyak peran aktor non negara, artinya masyarakat dari suatu negara bisa melakukan hubungan internasional dengan masyarakat dari negara lain. Dan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara melalui perantara pemerintah pusat.

Dengan mengambil contoh kerjasama yang diwujudkan dengan masuknya beberapa perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kulon Progo sebagai aktor non negara (INGO) yang termasuk diantaranya Korea dengan Perusahaan PT. Shung Chang Indonesia di tahun 2006 melakukan kerjasama

dalam bidang Industri rambut palsu. Badan Koordimasi Penanaman Modal RI (BKPM) sebagai unsur Pemerintah Pusat (GI) oleh setelah itu diteruskan ke BKPM dalam hal ini BKOMD Kulon Progo, dalam kedudukannya sebagai Lokal Government (LG), yaitu pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Karena Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu mitra strategis dari Kerjasama Sub Ekonomi Regional (KSER).

Dengan adanya kerjasama ini Kabupaten Kulon Progo semakin meningkatkan investasi asingnya tetapi belum signifikan. Dari pola skema gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara kewenangan Pemerintah Indonesia berperan sebagai fasilitator dan Kabupaten Kulon Progo menjadi implementator proyek kegiatan hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan asing.

Untuk dapat mengetahui visi dan misi setiap daerah, tentunya memerlukan bantuan dari pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Namun sebelum ada otonomi daerah, setiap daerah yang ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain diluar negeri sering terkendala akibat tidak mempunyai kewenangan untuk hubungan / bekerjasama dengan negara asing. Karena hubungan luar negeri masih menjadi wewenang pihak pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kemudian pemerintah pusat undang – undang yang berisi tentang Otonomi Daerah yang didalamnya memuat kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri/ kerjasama luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta bertujuan untuk dapat mencapai visi misi daerah tersebut.

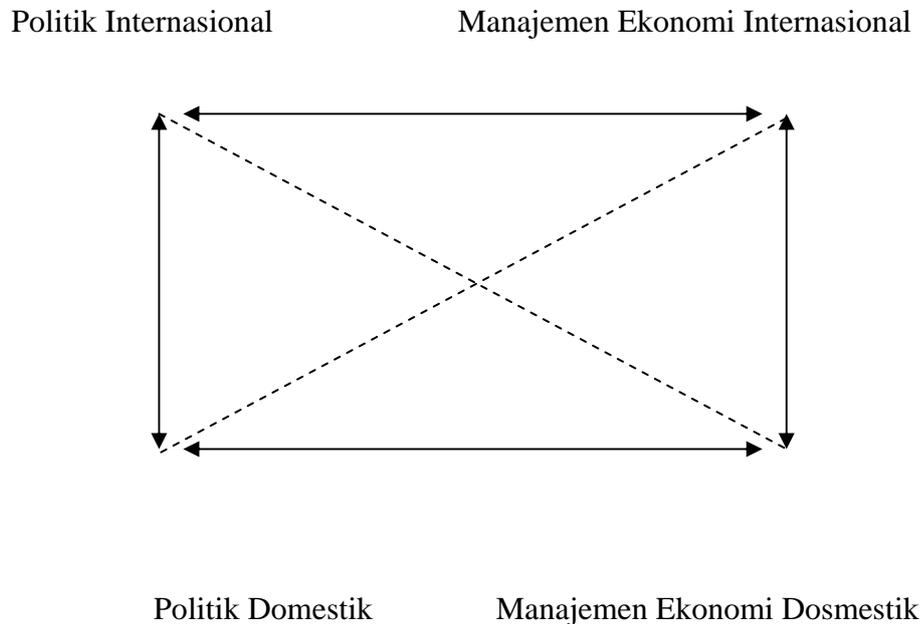
Dengan adanya Otonomi Daerah, aktor hubungan internasional tidak hanya negara namun juga propinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini mempunyai implikasi terhadap pola hubungan internasional yaitu pemerintah pusat dalam hal ini BKPM RI menempatkan aparatur disetiap propinsi atau pemerintah kabupaten dan kota dapat membentuk bidang/ bagian yang mengurus hubungan/kerjasama luar negri secara otonom.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti perintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri. Sedangkan otonomi daerah memiliki arti wewenang hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku¹². Meskipun sebagian wewenang pusat dilimpahkan kepada daerah namun kedaulatan, politik luar negeri, mata uang, hukum, undang-undang tetap menjadi wewenang pusat. Namun demikian, meskipun Politik luar negeri masih menjadi wilayah pemerintah pusat, adanya tekanan diplomasi dan arah kebijakan luar negeri akan diikuti oleh unsur-unsur kepentingan nasional dan daerah, dimana hubungan ekonomi internasional menjadi semakin peka terhadap ekonomi dalam negeri. Seperti yang dikatakan oleh pendukung hubungan transnasional, yang menekankan bahwa hubungan politik internasional dan ekonomi internasional akan mempengaruhi politik dan ekonomi dalam negeri dan sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dalam bagan berikut:

¹² Sarundajang, " Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, " dalam nugroho D riant, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2000)hal 42.

Gambar¹³

Kaitan-kaitan transnasional: politik dan ekonomi



Dalam Konteks kerja sama Investasi asing ini pemerintah pusat hanya berfungsi sebagai fasilitator, karena politik luar negeri menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Apabila pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo memerlukan kerja sama luar negeri maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan terhadap Menteri Luar Negeri melalui Direktur Perjanjian Ekososbud agar Bupati Kulon Progo sebagai kepala pemerintahan daerah memiliki full power dalam penandatanganan MoU¹⁴.

Hal ini sesuai pola interaksi hubungan transnasional yang tidak hanya mengakui negara sebagai satu-satunya aktor hubungan internasional tetapi juga

¹³ Mochtar Mas' Oed Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan Metodologi. (Jakarta :LP3ES, 1990.hal 233)

¹⁴ Depatemen Dalam Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri

aktor-aktor lain non negara, termasuk organisasi pemerintah/non pemerintah dalam negeri maupun internasional yang fokus perhatiannya bukan semata-mata pada masalah militer dan keamanan tetapi juga kepada isu ekonomi.

Dengan demikian otonomi Daerah telah memungkinkan suatu daerah atau propinsi dapat mengadakan hubungan luar negeri yang pada dasarnya sesuai dengan kerangka hubungan transnasional. Kerjasama Investasi Asing yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai gagasan yang melewati lintas batas negara tanpa dikendalikan oleh pusat, sehingga Kabupaten Kulon Progo dapat dikategorikan dalam kerangka hubungan transnasional tersebut.

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Sebagian transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama¹⁵. Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan keamanan.

2. KONSEP PENANAMAN MODAL

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha. Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan

¹⁵ K.J. Holstik, Politik Internasional Untuk Analisis, edisi keempat, jilid kedua, alih bahasa: M.tahir Azhary (Jakarta: Erlangga, 1998) hal.210

menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan penanam modal dalam negeri,¹⁶

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau investasi asing di suatu negara. Menurut teori Alam M. Rugman, ada dua faktor terpenting yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi¹⁷. Pertama Variabel lingkungan, variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau spesifik lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan modal pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen yang disebut human capital¹⁸. Adapun variabel non ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada suatu Negara. Adapun pengamat yang juga memasukkan Faktor Pemerintahan yang bersih berwibawa pada suatu negara (clean government and good governance) baik tuan rumah (host country) ataupun pemerintah asal penanam

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Thn 2008 Hal. 3

¹⁷ Sidik Jatmika, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001) hal 78

¹⁸ Sidik jatmika, Otonomi daerah Dalam perspektif Hubungan internasional (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001) hal 79

modal itu. Selain sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal asing disuatu lokasi. Kedua. Variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Ini merupakan yang kadang juga disebut sebagai faktor spesifik pemilikan¹⁹.

Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan m. Rughman menyatakan bahwa penanam modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo secara umum sebagai tuan rumah (host Country) harus memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penanaman modal asing²⁰.

Jadi dengan adanya konsep penanaman modal Kabupaten kulon progo diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Kabupaten Kulon Progo berupaya mencari ciri khas yang membedakan dengan daerah lain serta upaya meningkatkan daya saing iklim investasi, dan bagaimana cara meningkatkan iinvestor asing yang mau menanamkan modalnya disuatu negara.

¹⁹ Alan M. Rughman , Bisnis Internasional 1 jakarta: Pt. Intermedia, 1993 hal 147

²⁰ Alan M. Rughman, bisnis Internasional 1 Jakarta PT. Intermedia, 1993

E. HIPOTESA

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan didukung oleh teori-teori yang dinggap dapat membantu analisa maka penulis mengajukan hipotesa sebagai berikut: Strategi internasional kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Investasi asing adalah:

1. Strategi Eksternal dengan promosi dan kerjasama internasional.
2. Strategi Internal dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berinvestasi.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksplorati dengan studi literatur. Metode yang bersifat eksplorasi deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena realitas. Maka dari itu, penelitian yang menggambarkan metode kualitatif dengan mengumpulkan data skunder melalui study kepustakaan (library Research). Dalam penyajian data, penulis menggunakan studi literatur dalam pengambilan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, laporan research, koran, situs-situs internet, serta berbagai media lainnya yang terkait untuk mendukung penelitian

G. BATASAN PENELITIAN

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu luas pembahasannya. Penulis Membatasi penelitian ini dalam sejak tahun 2006-2010.

Sesuai dengan latar belakang masalah yaitu kabupaten Kulon Progo menargetkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan 20-30 persen akan tetapi belum terpenuhi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang terdiri alasan pemilihan judul, latar belakang masalah pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Memaparkan tentang kondisi umum Kabupaten Kulon Progo yang didalamnya akan membahas posisi geografis, potensi daerah, visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Kemudian dalam bab ini juga akan memaparkan sedikit tentang landasan hukum investasi dan masalah-masalah substansi undang-undang yang berlaku saat ini.

Bab III: Di bab ini akan membahas peluang-peluang investasi. Pembahasan dalam bab ini akan sedikit melihat peluang investasi, serta ancaman apa saja yang akan dapat mendorong atau menghambat investor asing akan ikut terlibat dalam proses pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Di bab ini penulis juga akan membahas hambatan-hambatan yang dihadapi investor dan Kabupaten Kulon Progo.

Bab IV: Akan membahas bagaimana Strategi Internasional Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan investasi asing yaitu Strategi eksternal dengan mengadakan promosi terpadu dalam dan luar negeri dan kerjasama Internasional. Strategi Internal dengan mengadakan meningkatkan kualitas layanan publik.

Bab V: Kesimpulan dan Penutup.